

HUKUM

44/90

LAPORAN PENELITIAN

PROYEK SPP/DPP UNIVERSITAS ANDALAS

KONTRAK No. 006/PP-UA/SPP-10/1990

KOLEKSI KHUSUS

PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ANDALAS

(70)

PERANAN ULAMA DALAM MEMASTAKATKAN KELUARGA BERENCANA  
DI KECAMATAN BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR

Oleh :

DRS. I Z H A R M A N

Fakultas Hukum



DEPARTMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Divisi Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS  
Padang 1990

## ABSTRAKSI

Judul penelitian ini adalah "Peranan Ulama Dalam Memasyarakatkan Keluarga Berencana di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar".

Ulama adalah merupakan salah satu dari bentuk pemuka masyarakat yang mempunyai peranan dalam pembinaan kehidupan beragama di daerah tempat tinggalnya. Program Keluarga Berencana adalah merupakan suatu kebijaksanaan Nasional yang sekaligus merupakan program Nasional yang selalu dituangkan dalam GBHN sejak Pelita I sampai Pelita V sekarang dan program Pelita selanjutnya. Program KB tersebut dalam rangka menciptakan keseimbangan antara sumberdaya manusia dengan sumber daya alam untuk mencapai tujuan Cita-cita Nasional. Namun dalam memasyarakatkan Keluarga Berencana harus memperhatikan nilai-nilai Agama, adat dan Nilai moral yang di anut oleh masyarakat. Dalam hal ini Ulama secara eksplisit mempunyai tugas ganda, yaitu disatu pihak ulama adalah bertugas sebagai pewaris Nabi dalam mengembangkan kehidupan beragama, dan dipihak lain sebagai pemuka masyarakat ulama dituntut untuk mendukung dan memasyarakatkan program KB Nasional, karena tugas Nasional Pada hakikatnya adalah juga merupakan tugas seorang ulama sebagai tokoh, pemuka dan panutan masyarakat.

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut di atas peneliti ingin mengetahui sejauh mana peranan Ulama di Kecamatan Batipuh dalam memasyarakatkan KB sesuai dengan perannanya sebagai juru Da'wah Islamiyah yang dicembannya.

Setelah dilakukan penelitian secara seksama, dapat diambil suatu intisari hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut :

Pada umumnya para ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar memiliki peranan yang besar dalam memasyarakatkan Keluarga Berencana di daerahnya. Hal ini terbukti dengan penemuan yang didapatkan, bahwa para ulama seluruhnya mengaku mendukung sepenuhnya terhadap program KB Nasional, para ulama tersebut berpendapat bahwa program KB tersebut sesuai dengan tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam, yaitu untuk menciptakan keluarga sejahtera dan bahagia. Sebagai partisipasi kongkrit dari ucapan para ulama tersebut, pada umumnya menyatakan, bahwa masalah keluarga Berencana termasuk salah satu topik yang sering dibahasnya dalam kegiatan da'wahnya, sehingga masyarakat tidak rugi-rugi untuk menjadi akseptor KB, karena masyarakat sudah mendapatkan penjelasan dari para ulama tersebut, mana cara ber KB yang dibolehkan menurut hukum Islam dan mana pun juga cara ber KB yang dilarang menurut hukum Islam.

Sebagai bukti kongkrit dari pertisipasi ulama tersebut semakin bertambahnya jumlah POS KB dan akseptor KB di Kecamatan Batipuh dari tahun ketahun.

## BAB I. P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah.

Program Keluarga Berencana di pedesaan, dilihat dari sejarahnya. Maka program Keluarga Berencana Pedesaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program Keluarga Berencana Nasional.

"... . Maka pelaksanaan program KB Pedesaan berkembang berdasarkan perkembangan program KB dari sejak awal diciptakannya program Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara resmi telah dimulai sejak awal Pelita I ( tahun 1969/1970). ...".<sup>1</sup>

"Tujuan program KB adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak dengan mengatur kelahiran, ...".<sup>2</sup>

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan target yang secara kuantitatif demografis berupa penurunan angka kelahiran sebesar 50 % pada tahun 2000 dari keadaannya tahun 1971.

Keluarga berencana yang semula dianggap tabu oleh masyarakat, akhirnya dapat dibawa sampai ke pelosok-pelosok pedesaan dan bahkan di beberapa tempat telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat menuju dibudayakannya norma keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

<sup>1</sup> BKKBN Pusat, Sejarah Awal Pelaksanaan Program KB Federasi Dalam Program KB Nasional, Biro Pembinaan Institut Masyarakat, 1988, halaman 25.

<sup>2</sup> Sejarah Perkembangan KB di Indonesia, BKKBN Pusat, 1988, halaman 29.

### BAB III. HASIL PENEMUAN PENELITIAN

#### A. Pendahuluan.

Dalam rangka mempersiapkan penelitian ini, agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pelakdannya, peneliti sebelumnya mempersiapkan beberapa hal yang mutlak adanya sebagai langkah awal dari kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

##### 1. Mencatat jumlah data yang akan diambil.

Bentuk data yang akan diambil dalam penelitian ini adalah :

1.1. Jumlah Ulama di Kecamatan Batipuh, sebagai obyek utama dari penelitian ini.

1.2. Jumlah tenaga penyuluhan KB (PLKB) di Kecamatan Batipuh sebagai pendukung dari penelitian ini

1.3. Jumlah POS KB di Kecamatan Batipuh, juga sebagai pendukung dalam penelitian ini

##### 2. Menentukan alat pengumpul data.

Sesuai dengan kebutuhan informasi dari data yang akan diambil, maka alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

2.1. Observasi.

2.2. Wawancara.

##### 3. Prosedur Penelitian.

Sebelum peneliti melakukan penelitian dilapangan, terlebih dahulu peneliti mengurus dan menyelesaikan persyaratan administratif, antara lain :

## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah peneliti komunikasi pada bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Seluruh ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar mendukung terhadap program Keluarga berencana Nasional. Lihat tabel I.
2. Pada umumnya ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugasnya sebagai juru da'wah kadang-kadang menyampaikan materi dakwahnya mengenai Keluarga Berencana. Bahwa keluarga berencana yang merupakan program Nasional dalam menuju keluarga bahagia dan sejahtera sesuai dengan ajaran Islam, karena tujuan perkawinan dalam Islam adalah juga menuju keluarga sejahtera dan bahagia. Lihat tabel II.
3. Seluruh ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berpendapat, bahwa alasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam untuk ber KB adalah karena takut miskin. Berarti selain karena takut miskin untuk ber KB menuut ajaran Islam adalah boleh. Lihat tabel III
4. Sebagian besar ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, berpendapat, bahwa KB hukumnya menurut hukum Islam adalah halal dan sebagian kecil berpendapat hukumnya mubah. Lihat tabel IV.

5. Seluruh ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berpendapat, bahwa abortus (pengguguran kandungan) sebagai cara untuk ber KB, hukumnya haram menurut hukum Islam. Lihat tabel V.
6. Sebagian besar ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar berpendapat, bahwa vasektomi (putusan saluran sperma pada kelamin laki-laki) dan tubektomi (putusan saluran tempat masuknya sperma laki-laki dari vagina wanita ke rahim wanita pada wanita) sebagai cara untuk ber KB, hukumnya adalah haram, dengan alasan karena merusak unsur jasmani pemberian Allah swt.. Dan sebagian kecil berpendapat mubah, dengan alasan karena darurat. Lihat tabel VI.
7. Seluruh ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar menukung terhadap program KB mandiri pedesaan atau program KB lingkaran biru, dengan syarat petugas KB hanya melayani orang yang betul-betul terikat dalam berumah tangga yang sah menurut hukum.

#### B. Pembuktian Hipotesis.

1. Hipotesis pertama berbunyi : "Secara keseluruhan para ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dalam memasyarakatkan KB, disuga sudah berpartisipasi aktif". Hipotesis di atas ternyata dapat dibuktikan, bahwa ulama sudah berpartisipasi aktif dalam memasyarakatkan KB di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Ini dapat dilihat pada tabel I , yaitu bahwa seluruhnya ulama

di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar mendukung terhadap program KB Nasional ( 100,00 % ), tabel II ini pada umumnya ulama di Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar kadang-kadang menyampaikan program KB dalam materi dakwahnya ( sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan jama'ahnya ) bahwa KB boleh menurut ajaran Islam ( 30,00 % ), tabel IV; sebagian besar menyatakan KB hasil menurut hukum Islam ( 60,00 % ) dan sebagian besar menyatakan hukumnya mubah ( 40,00 % ).

Pembuktian hipotesis pertama di atas didukung oleh sejumlah data yang ditunjukkan dalam tabel I dan vii.

2. Hipotesis dua berbunyi : " Semakin berperan para ulama dalam memasyarakatkan KB di Kecamatan Batipuh, semakin membudaya program KB Pedesaan di wilayah Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar".

Hipotesis ini terbukti, berdasarkan hasil observasi tentang keadaan perbandingan antara jumlah tenaga PIKB 7 orang dibantu oleh 30 orang ulama dapat mendirikan/mendorong masyarakat untuk mendirikan POS KB sebanyak 60 buah di Kecamatan Batipuh dengan jumlah Desa 38 dan 11 Nagari.

Pembuktian hipotesis di atas juga di dukung oleh data yang peneliti terima dari PIKB Kecamatan Batipuh tentang peningkatan jumlah akseptor KB dari desember tahun 1989 3066 orang, sampai desember tahun 1990 menjadi 3325 akseptor KB aktif.<sup>1</sup> Jadi meningkat sekitar 0,8 % setahun.

---

<sup>1</sup> Dicatat dari Operation Room, Kantor PIKB Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Kubu Kerambil Tgl.7.Dez,1990.

DAFTAR PUSTAKA

- Pdg. M. Leter, H. Drs, Tuntunan Rumah Tangga Muslim dan Keluarga Berencana, Angkasa Raya, 1985.
- BKKBN Pusat, Sejarah Perkembangan KB di Indonesia, PT. Manggala Putra Utama, Jakarta, 1983.
- , Sejarah Awal Pelaksanaan program KB Pedesaan Dalam Program KB Nasional, -----, 1988.
- , KB, Ditinjau dari segi Agama-Agama Besar di-Dunia, Biro Penerangan dan Motivasi, 1983.
- Birjen Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, UUD 1945, P 4, GMDI TAP NO. II/MPR/1989, Pahan Penataran P 4 Pola 100 dan 45 jam, 1989/1990.
- Suryabrata Sumadi, Drs, MA, ED.S, Phd., Metodologi Riset, Rajawali, Jakarta, 1986.
- S. Nasution, Prof. DR., Metode Riset, Jemars Bandung, 1982.
- Surahmad Winarno, Prof. DR. Basir-Basar Teknik Riset, Suatu Pengantar Metode Ilmiah, Transito, Bandung, 1982

LIBRARY  
UNIVERSITY OF  
PHILIPPINES DILIGUEZ